



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR : W.18-2015 UM.01.02 TAHUN 2025
NOMOR : 000.6.9.3 / 07 / 0900 / 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-04-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JONNY PESTA SIMAMORA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-85/KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dan dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tusun Nomor 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. DEBIT : Ketua Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Kabupaten Bengkayang, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan fungsi legislatif, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Kalimantan Barat;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kalimantan Barat;
- bahwa pembangunan hukum di Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin penegakan dan kepastian hukum, serta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.